

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Literasi keuangan merupakan sebuah kemampuan seorang individu dalam memahami serta menggunakan berbagai informasi mengenai keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks Indonesia, literasi keuangan syariah ini masih menjadi suatu hal yang penting karena seiring dengan perkembangan waktu dan zaman lembaga keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan, seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan juga investasi syariah. Hal ini menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai begitu pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, fenomena ini juga mulai meningkat dikalangan masyarakat terutama di kalangan umat muslim yang memiliki keinginan untuk selalu memastikan kegiatan transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi serta mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peranan yang cukup strategis guna meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dalam tugasnya OJK tidak hanya bertugas untuk mengawasi lembaga keuangan, namun juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai produk dan layanan keuangan, baik itu layanan keuangan berbasis konvensional maupun berbasis syariah. Maka dari itu OJK telah melakukan berbagai strategi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, namun tantangan yang dihadapi di kalangan masyarakatpun masih cukup besar.

Berdasarkan data yang didapatkan dari OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sendiri masih tergolong rendah. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sebesar 39,11 % dan indeks keuangan syariah sebesar 12,88 % (OJK, 2024). Dengan adanya bukti data yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah ini masih tergolong rendah maka ini merupakan sebuah kondisi yang kurang menguntungkan karena tingkat kesejahteraan suatu masyarakat akan sejalan dengan tingkat pemahaman keuangan dan kedekatan masyarakat itu sendiri terhadap akses keuangan.

Kurangnya kegiatan literasi keuangan akan memberikan dampak yang negatif terhadap perilaku keuangan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangannya. Nantinya mereka akan kesulitan merencanakan masa depan dengan baik, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada hutang, dan juga menggunakan pihak ketiga yang tidak jelas kredibilitasnya untuk melangsungkan transaksi keuangan. Dengan adanya fenomena ini dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi (Pulungan, 2017).

Kemiskinan sendiri disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan ekonomi serta pendistribusian pertumbuhan yang tidak merata. Karena pada hakikatnya suatu pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang inklusif, yang mana pertumbuhan ekonominya berjalan secara merata dan juga berkualitas (Wahid, Keuangan Inklusif : Membongkar Hegemoni Keuangan, 2014). Tentang hal ini, keuangan inklusif menjadi aspek yang cukup penting dalam hal mendukung literasi keuangan maka dari itu pada tahun 2013 OJK menyusun sebuah strategi

nasional literasi keuangan dan strategi nasional keuangan inklusif sebagai sebuah bentuk perhatian terhadap masyarakat guna peningkatan literasi keuangan masyarakat itu sendiri.

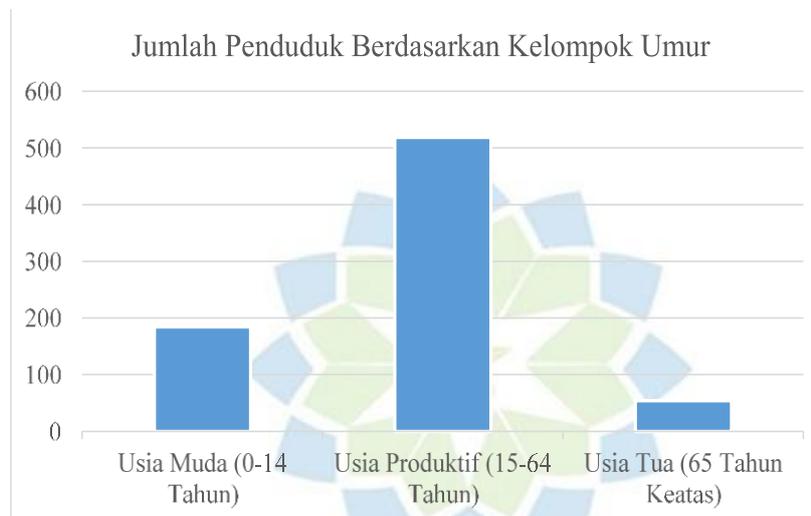
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan dalam memahami suatu hal. Jika melihat dalam konteks keuangan, maka literasi keuangan itu merujuk kepada kemampuan seseorang dalam mengelola dana yang dimiliki agar dapat berkembang dan memberikan kesejahteraan di masa yang akan datang. Misi utama dari program literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang bijaksana. Maka dari itu program ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap industri keuangan, sekaligus melindungi masyarakat dari resiko penipuan produk investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat tanpa melihat dan memperhatikan risikonya. (Otoritas Jasa Keuangan O. , 2017)

Selain memberikan pemahaman tentang manfaat dan juga resiko produk serta layanan jasa keuangan, literasi keuangan juga memiliki dampak positif yang cukup signifikan bagi sektor jasa keuangan. Literasi keuangan ini dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dengan lembaga keuangan itu sendiri, ketika tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat, maka akan lebih banyak lagi individu yang akan memahami dan juga memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara optimal sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa keuangan (Soetiono & Setiawan, Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan menekankan mengenai dua aspek utama dalam hal peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat, yaitu dengan cara perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Upaya ini memiliki tujuan untuk menjadikan industri jasa keuangan sebagai mitra yang akan mendukung kebutuhan masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai hal itu perlu adanya kerja sama yang erat antara OJK, pemerintah, dan industri jasa keuangan. Keberhasilan sebuah program literasi keuangan dapat bergantung kepada pelaksanaan program keuangan inklusif. Ketika kedua program ini dijalankan secara efektif, masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal dari layanan keuangan tersebut. Keuangan inklusif itu sendiri diartikan sebagai sebuah sistem layanan keuangan yang *universal* dan *non-eksklusif*, yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya kurang terjangkau, untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan secara adil dan mudah (Soetiono & Setiawan, Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia, 2018).

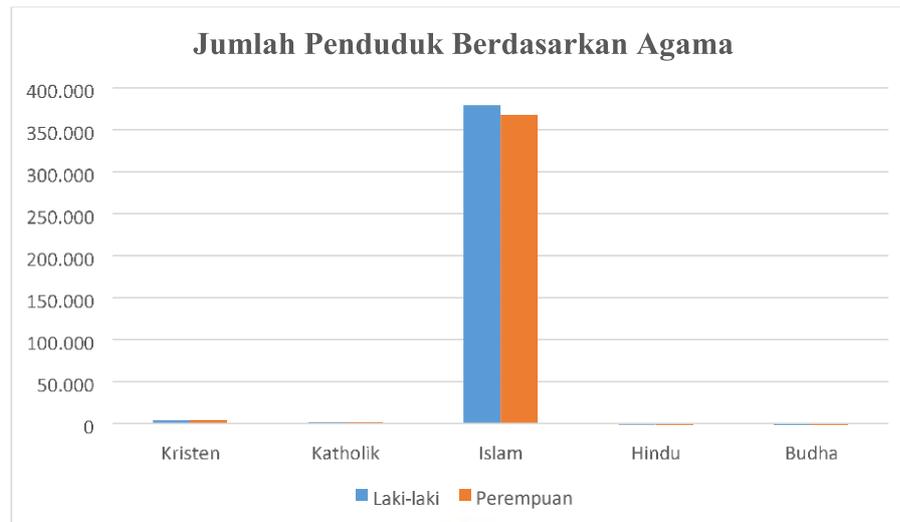
Otoritas jasa keuangan sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan telah menginisiasi berbagai strategi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Program-program seperti kampanye edukasi melalui media sosial, penyelenggaraan seminar, pelatihan, serta distribusi materi literasi keuangan syariah di tingkat pendidikan formal dan informal menjadi langkah konkret yang dilakukan.

Literasi keuangan syariah, aksesibilitas, perilaku keuangan, dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Kota Tasikmalaya dalam menggunakan jasa perbankan syariah, dengan kontribusi sebesar 57,4% (Septiawan , Safe'i, & Fitri, 2021)



**Gambar 1. 1** Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya dapat dilihat bahwa masyarakat dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia muda dan juga tua, jumlah dari usia produktif ini adalah sebanyak 518,931 orang. Dengan tingginya jumlah penduduk masyarakat di usia produktif diharapkan dapat menjadi sebuah peluang dalam persebaran informasi mengenai literasi keuangan syariah.



**Gambar 1. 2** Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan data yang dapat dilihat dari website Open Data Kota Tasikmalaya jumlah penduduk berdasarkan agama menunjukkan bahwa sudah sangat jelas jumlah penduduk yang beragama islam itu jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan agama lainnya. Jumlah dari penduduk yang beragama muslim itu sendiri terdapat 747.123 orang, yang mana jumlah laki-lakinya terdapat 379.477 orang dan perempuan berjumlah 367.646 orang.

Di wilayah Tasikmalaya sendiri menjadi salah satu wilayah yang sedang gencar menggalakkan berbagai sektor ekonomi syariah. Berdasarkan data yang didapatkan dari web open data kota Tasikmalaya, Tasikmalaya ini memiliki penduduk dengan mayoritas atau terbanyak dengan jumlah 747.123 orang atau sebesar 98,59 % dari jumlah penduduk kota Tasikmalaya pada tahun 2023 (Open Data Kota Tasikmalaya, 2024).

Walaupun memiliki tingkat mayoritas agama yang tinggi tingkat literasi keuangan syariah di Tasikmalaya ini masih tergolong rendah, yaitu sebesar 41,6%.

Implementasi strategi ini menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, akses geografis, serta ketidakmerataan informasi di masyarakat. Kondisi ini memperlambat penyebaran literasi keuangan syariah, meskipun Tasikmalaya dikenal sebagai wilayah dengan populasi mayoritas muslim yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah. (Az Zahra & Nurhasanah, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK dalam Pasal 28 menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka dari itu sebagai penerapan dari tujuan tersebut, OJK memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya baik berbasis umum maupun syariah (Indonesia, 2011).

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian mengenai strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hubungannya dengan peningkatan literasi keuangan syariah. Untuk itu peneliti mengambil judul “Strategi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Tasikmalaya.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan produk keuangan syariah.

3. Belum meratanya pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK Tasikmalaya.
4. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan literasi keuangan syariah.
5. Terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di lingkungan OJK Tasikmalaya.
6. Kurangnya sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah.
7. Belum adanya evaluasi mendalam terhadap efektifitas strategi yang dijalankan oleh OJK Tasikmalaya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus utama, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada strategi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Penelitian ini tidak membahas literasi keuangan secara umum, melainkan secara khusus menyoroti literasi keuangan berbasis syariah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Fokus penelitian ditujukan pada pandangan, strategi, serta kendala yang dihadapi oleh OJK Tasikmalaya, tanpa mengulas lembaga keuangan syariah lainnya secara mendalam maupun mengukur dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Subjek penelitian dibatasi pada pegawai OJK Tasikmalaya, khususnya di bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), serta mencakup program-

program edukatif yang dilaksanakan di wilayah kerja OJK Tasikmalaya. Penelitian ini juga dibatasi pada kegiatan dan data yang relevan selama periode tahun 2024 hingga 2025, sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

#### **D. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, tampaknya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara strategi Otoritas Jasa keuangan Tasikmalaya untuk meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat. Dengan demikian, peneliti akan membatasi masalah penelitian ini yang disusun menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK Tasikmalaya?
2. Apa strategi Otoritas Jasa keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat?
3. Apa kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK Tasikmalaya?
2. Untuk mengetahui apa strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

3. Untuk mengetahui apa kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dalam strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang dapat dirasakan oleh pihak yang akan berkaitan dengan hasil penelitian. Adapun kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi sebuah pengalaman serta menambah pengetahuan dan wawasan ilmu karena dengan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dalam strategi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.
- b. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Tasikmalaya dan lembaga keuangan syariah dalam mengatasi kendala penyebaran literasi keuangan syariah, seperti akses informasi dan infrastruktur.

- c. Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan peneliti.

